

**PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI
KELURAHAN PESISIR KECAMATAN LIMAPULUH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2017**

Oleh: Veny Risvayanti

Pembimbing : Abdul Sadad

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In order to improve the quality of housing and settlements, the government launched a city program without slums (KOTAKU) starting in 2016. The No Slum City Program (KOTAKU) is a program implemented nationally in 271 Regencies / Cities in 34 Provinces that become "collaboration platforms". Pesisir is one of the villages that received the KOTAKU program in Pekanbaru City, the purpose of this study is to see how the Implementation of the No Slum City Program (KOTAKU) in the Pesisir Sub-District of Pekanbaru City and what are the factors that inhibit the KOTAKU Program Implementation . This research was conducted in Pesisir Sub-District, Limapuluh Subdistrict, Pekanbaru City. The theoretical concept used in this research is Manullang theory management which has four management function indicators, namely planning, organizing, directing, and controlling. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The selection of research informants used purposive sampling technique. The results of this study indicate that the implementation of the No Slum City Program (KOTAKU) in Pesisir Sub-District of Limapuluh Kota District in 2017 has not been carried out optimally. In the planning stage there were people who agreed and disagreed when eating the road and their home page was used for more environment well. At the stage of organizing a miss communication between the LKM and the KSM. At the implementation stage there were still delays in work assignments in the field, while the factors that hampered the implementation of the No Slum City (KOTAKU) program in Pesisir Village were community participation.

Keywords : Implementation, No Slum City Program (KOTAKU)

1.1 Latar Belakang

Pertambahan penduduk disertai arus urbanisasi yang tinggi, maka masalah pembangunan dalam hal ini penyediaan sarana permukiman menjadi semakin mendesak, terutama di daerah perkotaan. Bertambah pesatnya pembangunan kota, dengan arus urbanisasi yang tinggi dan dengan terjadinya kecendrungan meningkatnya pembangunan industri baru menyebabkan bertambahnya beban bagi lingkungan perkotaan. Pergeseran pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri dan jasa perdagangan menyebabkan semakin berkurangnya lahan untuk permukiman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Undang-undang ini mengamanahkan bahwa *“negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia”*.

Berdasarkan Undang-undang diatas, pemerintah berkomitmen untuk mengentaskan permukiman kumuh dengan target zero kumuh hingga tahun 2019, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, maka pemerintah meluncurkan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) mulai tahun 2016.

Kota Pekanbaru yang menyandang status sebagai ibu kota Provinsi Riau yang dihadapkan persoalan kumuh dengan luas wilayah kumuh lebih kurang 632,27 km² dan 113,56 ha terdiri dari 8 kawasan yang tersebar di 19 kelurahan dari 6 kecamatan, yang mayoritas akibat padatnya permukiman serta tingkat ekonomi masyarakat rendah. Sebaran kawasan kumuh di Kota Pekanbaru, terjadi pada lokasi-lokasi yang dekat dengan pusat perdagangan dan jasa. Kecamatan Limapuluh merupakan salah satu kecamatan yang menjadi lokasi sasaran KOTAKU yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 dan menjadi salah satu prioritas peningkatan kualitas permukiman kumuh tahap pertama pada tahun 2017, dimana dikawasan Kecamatan Limapuluh merupakan kawasan pusat bisnis dan heritage Kota Pekanbaru, dengan ada banyaknya hotel-hotel sebagai salah satu penunjang pergerakan bisnis. Kelurahan-kelurahan di Kecamatan Limapuluh yang mendapatkan program salah satunya Kelurahan Pesisir berdasarkan data pra riset dimana memiliki luas kawasan kumuh dengan dengan luas 6,40 ha memiliki permasalahan utama yaitu fisik hunian, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, kepadatan bangunan, dan kepadatan penduduk. Kelurahan Pesisir masuk dalam kategori kumuh sedang dengan karakteristik permukiman pusat kota atau kumuh padat, memiliki Batasan delinasi kumuh yaitu RW 001 (RT 001, RT 002), RW 002 (RT 001, RT 002, RT 003, dan RT 004), dan RW 008 (RT 003).

Dalam pelaksanaan program tentu saja sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan terutama masyarakat Kelurahan Pesisir, berdasarkan wawancara pra riset berkenaan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dibangun selaras dengan dana yang telah diterima dari pemerintah, tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pencapaian tujuan dari program tersebut di Kelurahan Pesisir. Pertama, partisipasi masyarakat yang kurang dalam menghadiri rapat karena kesibukan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan mereka menjadikan mereka kadang sulit untuk mengambil keputusan mana yang harus di lakukan antara kepentingan individu atau kepentingan bersama. Kedua, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam perluasan lahan untuk lingkungan yang lebih baik. Ketiga, Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat mengenai maksud program yang di laksanakan di Kawasan lingkungan sekitar rumahnya, mereka beranggapan program ini adalah proyek besar yang di kira masyarakat LKM meminta jatah untuk melaksanakan program KOTAKU. Keempat, adanya keterlambatan tugas kerja dalam proses pelaksanaan dilapangan yang berdampak pada segi waktu, bahan dan upah. Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka peneliti pun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian mengenai masalah ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti, dan memeberikan infomasi yang

berguna bagi perkembangan ilmu administrasi publik.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang dalam menyusun kebijakan dari Program Kota Tanpa Kumuh.

1.5 Konsep Teori

1. Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata “manage”. Kata ini, menurut kamus *The Random House Dictionary of the English Language* (1967), berasal dari bahasa Italia “*manegg(iare)*” yang bersumber pada perkataan Latin “*manus*” yang berarti “tangan”. Secara harfiah *manegg(iare)* berarti “menangani atau melatih kuda”, sementara secara maknawiah berarti “memimpin”, membimbing, mengatur”. Ada juga yang berpendapat bahwa manajemen berasal dari kata kerja bahasa Inggris “*to manage*” yang sinonim dengan *to hand*, *to control*, dan *to guide* (mengurus, memeriksa, dan memimpin). Untuk itu, dari asal kata ini manajemen dapat diartikan pengurusan, pengendalian, memimpin, atau membimbing (Mulyono, 2016:16).

Melayu S.P Hasibuan (2014:1) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

G.R. Terry dalam **Hasibuan (2008:2)** Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan. Untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber

daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Andrew F. Sikula dalam **Hasibuan (2008:2)** Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk barang atau jasa secara efisien.

Sudirdjo dalam **Manulang (2015:3)** fungsi manajemen meliputi:

a. Perencanaan (*Planning*)

Soerdasono dalam **Relawati (2012:52)** perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai fungsi untuk memilih dan menentukan cara-cara yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam batas waktu tertentu.

Schermerhorn dalam **Feriyanto dan Triana (2015:5)** perencanaan meliputi pemilihan misi dan tujuan organisasi serta cara terbaik untuk mencapainya.

Terry dalam **Priansa dan Garinda (2015:36)** mendefinisikan perencanaan sebagai penentuan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan, dan siapa yang mengerjakannya. Dalam perencanaan terlibat unsur penentuan yang berarti bahwa dalam perencanaan tersebut tersirat pengambilan keputusan. Karena itu perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dalam suatu kerangka untuk mengambil keputusan dan penyusunan rangkaian tindakan selanjutnya di masa depan. Rencana yang baik akan merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Penentuan tujuan atau

sasaran adalah penting bagi setiap organisasi karena:

- a. Tujuan atau sasaran bersifat memberikan arahan;
- b. Dengan adanya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan akan membantu orang-orang dalam organisasi untuk memotivasi diri;
- c. Tujuan atau sasaran akan memfokuskan usaha pelaksanaan organisasi;
- d. Sebagaimana disadari bahwa keberadaan sumber daya umumnya adalah terbatas. Dengan adanya tujuan atau sasaran dapat memprioritaskan pengalokasian sumber daya untuk tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.;
- e. Tujuan atau sasaran menjadi pedoman bagi penyusunan rencana strategis maupun rencana operasional organisasi serta pemilihan alternatif keputusannya.
- f. Tujuan atau sasaran membantu mengevaluasi kemajuan yang akan dicapai menjadi pedoman bagi penyusunan. Ini berarti bahwa tujuan atau sasaran yang ingin dicapai itu bisa dipakai sebagai standarisasi.

b. (*Organizing*)

Handoko (2013:167)

mendefinisikan pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya- sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.

c. Pengarahan (*Directing*)

Directing merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat

dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Stoner dalam **Herlambang (2013:4)** mendefinisikan *directing* sebagai mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi para bawahan.

Sementara hal lain dikemukakan oleh **Koentz** dalam **Hasibuan (2014:2)** mengenai *directing* yaitu suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemberian perintah dan saran agar para bawahan dapat mengerjakan tugas yang dikehendaki manajer. Kegiatannya meliputi mengambil keputusan, mengadakan komunikasi antara manajer dan bawahan agar ada rasa saling pengertian, memberikan semangat, motivasi atau dukungan kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya.

Directing juga dijelaskan oleh **Gulick** dalam **Adisasmita (2011:24)** sebagai penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terdapat pada tugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, dengan pengarahan staff yang telah diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugas dibidangnya masing-masing tidak menyimpang dari garis program yang telah ditentukan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang, karena pelaksanaan perencanaanlah yang diawasi sebaiknya pengawasan ditujukan pada usaha mencegah berbagai jenis bentuk penyimpangan atau penyelewengan, baik disengaja maupun tidak. Semua fungsi manajemen tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*Controlling*).

Beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu cara yang digunakan dalam

suatu organisasi/perusahaan yang dimana didalamnya terdapat sebuah proses dengan berbagai tindakan-tindakan untuk mencapai suatu tujuan.

2. Pelaksanaan

Actuating disebut juga “gerakan asli” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengamati dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Terry dalam Mulyono (2008) mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Fungsi *actuating* harus dimulai dari atas dengan menunjukkan kepada staff bahwa dia memiliki tekad untuk mencapai kemajuan dan peka terhadap lingkungannya. Ia harus memiliki kemampuan kerjasama dan harus bersikap obyektif.

Terkait dengan konsep *actuating* yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi ini mengandung arti bahwa penggerakkan atau pengarahan adalah bagaimana pelaksanaan atau implementasi rencana-rencana yang telah ditetapkan. Merangsang anggota

melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. **Dimas dkk (2010)** tujuan pelaksanaan atau *actuating* adalah:

- a. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien.
- b. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staff.
- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.
- d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staff.
- e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

Tahap pelaksanaan mencakup beberapa poin penting, yaitu:

1. *Directing*

Dalam bahasa Indonesia dapat berarti membimbing dan memberi petunjuk atau pengarahan. **Sagala (2011)** kegiatan *directing* antara lain: 1) memberikan dan menjelaskan perintah; 2) memberikan petunjuk melaksanakan suatu kegiatan; 3) memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan/kecakapan, dan keahlian agar lebih efektif dalam melaksanakan berbagai kegiatan organisasi; 4) memberikan kesempatan ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk memajukan organisasi berdasarkan inisiatif dan kreativitas masing-masing; 5) memberikan koreksi agar setiap personal melakukan tugas-tugasnya secara efisien, sebagai pengarah para pimpinan tersebut berada pada tingkat pimpinan eksekutif tertinggi pada institusi tersebut.

2. *Communicating*

Komunikasi diartikan sebagai proses pemindahan dalam gagasan atau informasi seseorang ke orang lain. Komunikasi antara para pimpinan dan karyawan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan menjalin komunikasi yang baik maka akan menimbulkan suasana kerja yang kondusif di perusahaan dan akan menumbuhkan *teamwork* atau kerjasama yang baik dalam berbagai kegiatan perusahaan.

3. *Coordinating*

Coordinating merupakan sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha individu yang berhubungan dengan jumlah, waktu dan tujuan mereka sehingga dapat diambil tindakan yang serempak menuju sasaran yang telah ditetapkan. Mempersatukan dan mengkorelasikan semua aktivitas agar tidak terjadi kekacauan, percecokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyelaraskan, dan menyatukan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

Nugroho (2012:15) mengatakan pelaksanaan secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan tahap secara politik karena walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Tahap pelaksanaan terjadi hanya setelah keputusan hukum ditetapkan dan dana disediakan. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya bersangkut paut dengan mekanisme operasional kebijakan kedalam prosedur-prosedur birokrasi, melainkan juga terkait dengan masalah konflik keputusan dan bagaimana suatu kebijakan tersebut diperoleh kelompok-kelompok sasaran. Studi pelaksanaan kebijakan atau analisis implementasi

kebijakan memfokuskan diri pada aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah proses kerja sama antara atasan dengan karyawannya dalam mencapai efektivitas kerja yang harmonis sehingga meningkatkan motivasi kerja karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

1. skala kecil dan jangka panjang. Limbah organik termasuk ke dalam jenis limbah biasa.
2. Limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan serius meski pada skala kecil pada jangka pendek maupun panjang.

3. Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “program” artinya rancangan mengenal azas serta usaha yang dilaksanakan. Program dapat dikatakan sebagai sebuah rencana yang didalamnya mencakup sejumlah usaha yang ingin dilakukan meski tidak semuanya bisa direalisasikan. Sebuah program besar dapat didefinisikan sebagai rencana komperhensif yang meliputi penggunaan macam-macam sumber daya untuk masa yang akan datang dalam sebuah pola yang terintegrasi dan menetapkan suatu urutan masing-masing tindakan tersebut dalam rangka usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Program adalah unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa

didalam setiap program dijelaskan mengenai:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. *“A programme is collection on interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives”* (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan yang telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

Sujianto (2008:32) program adalah suatu kompleks dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas, dan langkah-langkah yang harus diambil. Sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu.

Karding (2008:33) menyatakan bahwa program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana apa yang dilakukan. Apabila “program” ini dikaitkan dengan evaluasi program maka didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan,

berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu:

- a. Program adalah realisasi atau imlementasi suatu kegiatan.
- b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi berkesinambungan.
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Nakamura dan Smallwood dalam **Sujianto (2008:152)** mengemukakan bahwa ada tiga cara yang dominan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program:

- a. Prespektif yang menilai keberhasilan pelaksanaan program dari aspek kepatuhan aparat birokrat bawahan kepada birokrat atasannya, atau derajat kepatuhan birokrasi-birokrasi pada umumnya terhadap mandate/kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang.
- b. Keberhasilan pelaksanaan program dari segi berfungsinya prosedur-prosedur rutin dalam pelaksanaan program dan tidak adanya konflik kedua prespektif ini mendefinisikan keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi proses.
- c. Keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi pencapaian tujuan-tujuan programatis yang diharapkan dari dampak program.

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dari pelaksanaan dari suatu kegiatan.

Lebih lanjut dijelaskan jika suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
2. Penentuan peralatan yang baik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
4. Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut.
5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya, karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri.
6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyedia tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Charles O. Jones dalam **Suryana (2009:28)** berpendapat bahwa ada tiga pilar aktivitas dalam melaksanakan program yaitu:

1. Pengorganisasian
Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam melaksanakan program sehingga tenaga pelaksana dapat dibentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi
Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penerapan atau Aplikasi
Kesimpulannya program program merupakan interpretasi dari

sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan agar hal tersebut dapat berjalan dengan tersistematik dan sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut.

Dalam menggambarkan dan menganalisis program terdapat bagian-bagian pokok yang harus ada, yaitu: inputs, komponen, implementasi, kerja dilapangan, bentuk-bentuk hubungan antar lini, outcomes **Afrizal** dalam **Wirawan (2012:26)**.

- a. Inputs: adalah sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan program, contohnya: dana, SDM, sarana, fasilitas pendukung, pengetahuan, dll.
- b. Komponen: kelompok aktif dalam program.
- c. Implementasi kerja atau pelaksanaan: contohnya modal untuk menilai kebutuhan pelatihan bagi peserta, skill department untuk menyediakan tenaga-tenaga terampil.
- d. Bentuk-bentuk hubungan antar lini: maksudnya adalah inventarisir faktor-faktor apa saja yang bisa menjembatani antara output dari suatu program dengan outcomes.
- e. Outcomes: sebanyak mungkin output program diterima masyarakat pada semua sektor.

Pengertian diatas dapat diketahui bahwa program adalah suatu wacana yang dibuat untuk kepentingan bersama melalui kebijakan dan aturan yang telah dibuat.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut (Creswell, 2016), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, analisis data secara individu membangun data yang persial kedalam tema, dan menafsirkan makna data. Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas berdasarkan hasil penelitian yaitu Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017.

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian Penelitian dilakukan di RT 001 RW 002 Gg. Tanjung Uban Kelurahan Pesisir Jalan Sultan Syarif Qasim No.60 Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, alasan memilih lokus Kelurahan Pesisir karena masuk dalam prioritas peningkatan kualitas kumuh tahap pertama tahun 2017 dan sebagai warga penerima manfaat langsung yaitu warga sekitar dan warga miskin/MBR yang paling tinggi. Fokus penelitian ini adalah pada Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017.

1.5.2 Informan Penelitian

Adapun key informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pelaksana Pokja PKP Bidang Perumahan dan Permukiman Kota Pekanbaru
2. PPK/Satker PKP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru
3. Tim Koordinator Kota Bidang Infrastruktur Lingkungan Program Kota Tanpa Kumuh Kota Pekanbaru
4. Ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat/LKM Tunas Karya Kelurahan Pesisir.
5. Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM Kelurahan Pesisir
6. Masyarakat Kelurahan Pesisir

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah sumber data primer dan skunder, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi.

1.5.4 Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data pokok yang diperoleh setelah melakukan penelitian dari beberapa responden yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data tersebut langsung diperoleh dari informan, data diperoleh melalui:

1. Wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan penelitian yaitu Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017 yaitu Ketua Tim Pelaksana Pokja PKP Bidang Perumahan dan

Permukiman Kota Pekanbaru, PPK/Satker PKP Kota Pekanbaru, Tim Koordinator Kota Bidang Infrastruktur Lingkungan Program Kota Tanpa Kumuh Kota Pekanbaru, Ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat/LKM Tunas Karya Kelurahan Pesisir, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM Kelurahan Pesisir dan Masyarakat Kelurahan Pesisir

2. Data juga diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Data Sekunder

Adalah data yang Data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk yang sudah jadi berbentuk naskah tertulis atau dokumen, buku-buku, hasil laporan dan penelitian terdahulu (jurnal). Dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian seperti data:

1. Profil Kecamatan dan Kelurahan
2. Undang-undang dan Surat Keputusan (SK)
3. Dokumen Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Pekanbaru
4. Surat Edaran Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh
5. Buku-buku Bacaan yang Berkaitan dengan Penelitian
6. Jurnal yang Berkaitan dengan Perumahan dan Permukiman Kumuh dan Pelaksanaan

Analisis data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan pelaksanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di kelurahan pesisir kecamatan limapuluh kota pekanbaru tahun 2017 dalam penelitian ini adalah analisis dengan kualitatif Triangulasi.

1.6 Hasil

1.6.1 Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Pada bab ini, penulis akan mengemukakan hasil penelitian mengenai bagaimana Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017 dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017 tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian dalam latar belakang masalah, bahwa pentingnya suatu manajemen dalam pelaksanaan untuk suksesnya organisasi yang dijalani dan bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan awal yang ingin di capai oleh suatu organisasi tersebut, dalam hal ini pelaksanaan pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru ini.

Melihat masih adanya permasalahan yang di hadapi tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017 dengan menggunakan teori *Prajudi Atmosudirdjo dalam Manullang*

yang mengacu pada segi manajemen yaitu dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

a. Perencanaan

Perencanaan juga dapat di definisikan sebagai proses untuk menentukan tujuan kinerja organisasi di masa depan serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perencanaan dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Adapun indikator perencanaan dalam penelitian ini yaitu penetapan tujuan, prosedur, anggaran dan program. sebelum melakukan pekerjaan dilapangan dilakukan terlebih dahulu perencanaan sebelum pelaksanaan program tersebut hanya saja masih ada masyarakat yang setuju dan tidak setuju ketika memakan jalan dan halaman rumah mereka dalam kegiatan pembangunan infrastruktur.

b. Pengorganisasian

Organisasi merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang di anggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang di limpahkan terhadap setiap individu yang di tugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pengorganisasian dalam tanggung jawab kerja dalam pelaksanaan program KOTAKU sudah jelas dan terarah dengan adanya juklak juknis dan (POS) dari peran masing-masing dari pelaku. adapun indikator-indikator dari pengorganisasian yaitu perumusan tujuan dengan jelas, pembagian kerja dan tanggung jawab hanya saja dalam pengorganisasian terjadinya miss komunikasi antara pihak

LKM dan KSM dan masih adanya anggota yang tidak aktif.

a. terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Hal ini dilakukan

c. Pengarahan

Directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas tersebut dapat di lakukan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah di tetapkan oleh organisasi. Adapun indikator pengarahannya dalam pelaksanaan program KOTAKU di kelurahan pesisir yaitu bimbingan dan perintah, hanya saja dalam pelaksanaan program KOTAKU dilapangan terjadi keterlambatan tugas kerja yang akan mempengaruhi segi mutu, bahan sama upah. Jadi harus dilakukan pencairan uang dulu itu yang harus dikendalikan dalam pelaksanaan program karena proses pencairan dana bertahap dan juga akan memakan waktu pengerjaan dilapangan.

d. Pengawasan

Pengawasan dapat di artikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang telah di laksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus di capai yaitu standar. Apa yang harus di lakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Dalam pengawasan ada dua indikator yang digunakan dalam pelaksanaan

program KOTAKU di kelurahan pesisir yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi langsung kelokasi atau terjun kelapangan dimana infrastruktur tersebut sedang dibangun oleh pihak-pihak yang terlibat dalam program KOTAKU. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dalam bentuk pembuatan laporan kegiatan.

1.6.2 Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Adapun Hasil penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017, di teukan beberapa faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Program KOTAKU, adapun faktornya yaitu Partisipasi Masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam pencapaian sasaran program kotaku, keberhasilan bukan semata - mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program kotaku. Partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan kemampuan dan biaya dalam pencapaian pelaksanaan program.

1.7 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan

Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017 berdasarkan indikator-indikator yang dipakai yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dimana hasil dari penelitian ini masih belum maksimal, hal ini dikarenakan masih adanya fungsi-fungsi manajemen yang belum dilaksanakan secara maksimal seperti pada tahapan perencanaan, pada tahap ini ada masyarakat yang setuju dan ada yang tidak setuju ketika memakan jalan dan halaman rumah mereka digunakan pembangunan infrstruktur untuk lingkungan yang baik. Pengorganisasian, pertama terjadinya miss komunikasi antara pihak LKM dan pihak KSM yang dimana pihak LKM mengatakan adanya pelatihan dari kegiatan ini, namun dari pihak KSM sendiri mereka mengatakan tidak adanya pelatihan. Kedua jumlah anggota ada sembilan orang namun kenyataan dilapangan yang aktif hanya enam orang dikarenakan program ini swakelola tidak digaji dan juga kesadaran anggota mengenai program KOTAKU masih kurang. pelaksanaan, pada tahap ini masih adanya keterlambatan tugas kerja dari pelaksana lapangan yang harus dikendalikan karena akan berpengaruh pada segi mutu, bahan, upah dan waktu pengerjaan karena proses pencairan dana dilakukan secara bertahap.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017 ini adalah terdapat pada partisipasi masyarakat, keikutsertaan masyarakat/partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan program, hal ini dikarenakan tujuan dari program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dipermukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Untuk pencapaian tujuan program diperlukannya keterlibatan masyarakat secara optimal dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap berkelanjutan, namun kenyataan dilapangan masyarakat masih kurang antusias berpartisipasi dalam program tersebut.

1.8 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017, penulis memberikan saran-saran yang sifatnya membantu yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak yang terlibat dalam program KOTAKU agar dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan dari program tersebut agar masyarakat ikut

berpartisipasi dalam perluasan lahan untuk lingkungan yang lebih baik, diharapkan lebih ditingkatkan lagi komunikasi antar pihak yang terlibat dalam program KOTAKU terutama antar pihak LKM dan pihak KSM agar tidak terjadi kesalahpahaman.

2. Diharapkan lebih ditingkatkan lagi sosialisasi tentang program KOTAKU kepada masyarakat sebagai penerima program sehingga pemahaman masyarakat terhadap pentingnya program tersebut dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan dari program tersebut, terutama sosialisasi dalam bentuk pertemuan langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I, R. 2008. *Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- 2010. *Pembangunan Kota Optimum, Efisien & Mandiri*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- 2009. *Mengenal Manajemen Organisasi*. Jakarta : Yudistira
- Creswell, Jhon. W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Djunaedi, Achmad. 2015. *Pengantar Perencanaan Wilayah Dan Kota*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Feriyanto, Andri dan Endang Shyta Triana. 2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1) untuk Mahasiswa dan Umum*. Yogyakarta: Mediaterra
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Handoko, T.H. 2013. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen (cara mudah memahami ilmu manajemen)*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Manullang, M. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marnis, Priyono. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher
- Mirsa, Rinaldi. 2012. *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Prayitno, Budi. 2016. *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sadana, A. S. 2014. *Perencanaan kawasan Permukiman*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sastrawijaya, A. Tresna. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung : Alfabeta
- Sujiyanto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Usman, Husaini. 2013. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta Timur: Bumi Aksara
- Jurnal
- Fitriarahmi. 2016. *Pengawasan Camat Dalam Penataan Pemukiman Kumuh Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru*. jurnal ilmu administrasi fisip universitas riau. Volume 3 NO. 2 Oktober 2016. (Portalaruda.org)
- Sueca, N. P. 2004. *Pemukiman kumuh masalah atau solusi*. Jurnal fakultas teknik. Volume 2 No.2 Agustus 2004. (<http://ojs.unud.ac.id>)